



## **Pengaruh Pekerja Informal, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kredit BPR Terhadap Kemiskinan Indonesia: Analisis Data Panel**

**Nadya Putri Aulia<sup>1</sup>, Dita Dismalasari Dewi<sup>2</sup>**

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: nadya.22099@mhs.unesa.ac.id<sup>1</sup>, ditadewi@unesa.ac.id<sup>2</sup>

Kata kunci:	ABSTRAK
Kemiskinan; Pekerja Informal; Indeks Pembangunan Manusia; Kredit BPR.	Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pekerja informal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan data panel 34 provinsi selama periode 2019–2023 dengan metode Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal dan kredit BPR berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai p-value masing-masing 0,0003 dan 0,0146, sedangkan IPM berpengaruh negatif signifikan (p-value 0,0000). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya proporsi pekerja informal yang berpendapatan rendah dan minim perlindungan sosial serta penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran dan kurang produktif dapat memperburuk kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan kualitas pembangunan manusia mampu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan. Implikasi temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan transformatif yang mengintegrasikan peningkatan kualitas SDM, formalisasi sektor informal dengan jaminan sosial yang memadai, dan reformasi sistem penyaluran kredit mikro agar lebih inklusif dan produktif. Secara praktis, pemerintah perlu memperkuat program pelatihan vokasi, perluasan cakupan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, serta pendampingan usaha bagi penerima kredit mikro untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal.

### **Keywords:**

Poverty; Informal Employment; Human Development Index; BPR Credit.

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the influence of informal workers, the Human Development Index (HDI), and People's Credit Bank (BPR) credit on poverty levels in Indonesia using panel data from 34 provinces for the 2019–2023 period and the Fixed Effect Model (FEM). The results show that informal workers and BPR credit have a positive and significant effect on poverty (p-values of 0.0003 and 0.0146, respectively), while HDI has a negative and significant effect (p-value 0.0000). These findings indicate that a high proportion of informal workers with low incomes and limited social protection, as well as misdirected and unproductive credit allocation, can exacerbate poverty. Conversely, improvements in human development can reduce poverty by increasing productivity and income. The implications of these findings highlight the need for transformative policies that integrate human capital improvement, formalization of the informal sector with adequate social protection, and reform of microcredit distribution systems to ensure greater inclusiveness and productivity. Practically, the government needs to strengthen vocational training programs, expand BPJS*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan kondisi ketika pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kehidupan yang layak (Ilyasa et al., 2025). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masalah ini bersifat kompleks karena bukan semata akibat pendapatan dan konsumsi yang rendah, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan publik, dan partisipasi dalam pembangunan (Riyandini, 2024). Berdasarkan data BPS (2023), tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta jiwa. Meskipun persentasenya menurun dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin tersebut masih lebih besar dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sebesar 25,14 juta jiwa. Pandemi COVID-19 telah mengubah secara drastis kondisi sosial ekonomi masyarakat, menurunkan aktivitas ekonomi dan pendapatan rumah tangga, serta meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Khamis et al., 2021; Putra et al., 2023). Secara spasial, tingkat kemiskinan juga menunjukkan kesenjangan antardaerah di mana Papua (26,03%), Papua Barat (20,49%), dan Nusa Tenggara Timur (19,96%) tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sedangkan Bali (4,25%), Kalimantan Selatan (4,29%), dan DKI Jakarta (4,44%) merupakan yang terendah (BPS, 2023c). Kondisi ini mencerminkan belum meratanya hasil pembangunan dan disparitas kapasitas ekonomi antarwilayah (Sabaha et al., 2025).

Berdasarkan laporan World Bank (2023), upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia menuntut kebijakan yang menekankan peningkatan produktivitas tenaga kerja, akses terhadap pendidikan dan pekerjaan layak, perlindungan sosial, serta inklusi keuangan bagi kelompok rentan. Secara teoretis, Sharp (1996) dalam Istiyani et al. (2024) menjelaskan bahwa dari sisi ekonomi kemiskinan dapat timbul akibat ketimpangan kepemilikan sumber daya, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses terhadap modal. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk lingkaran kemiskinan sebagaimana dijelaskan oleh Nurkse (1953) dalam teori Vicious Circle of Poverty (Kuncoro, 2013). Ketimpangan kepemilikan sumber daya, ketidaksempurnaan pasar, dan keterbatasan modal menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang rendah mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya membatasi kemampuan untuk menabung dan berinvestasi, sehingga kondisi ini memperkuat keterbelakangan ekonomi dan memerangkap masyarakat dalam lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan (Taufiq & Dartanto, 2020). Salah satu manifestasi dari ketimpangan ekonomi dan sosial tersebut terlihat pada dominasi sektor informal dalam struktur ketenagakerjaan di Indonesia, dimana pekerja informal identik dengan pendapatan rendah, ketidakstabilan kerja, dan minimnya perlindungan sosial (Brown & Roeffer, 2016; ILO, 2018; Setyanti, 2020). Fenomena ini juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan formal dan modal usaha, sehingga banyak individu

beralih ke aktivitas ekonomi informal yang lebih fleksibel dan memiliki hambatan masuk rendah (ILO, 2018).

Secara nasional, BPS (2023) mendefinisikan pekerja informal sebagai individu yang bekerja dengan status utama sebagai pekerja berusaha sendiri, pekerja bebas, pekerja keluarga atau tidak dibayar, serta pekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. Pada tahun 2020, proporsi pekerja informal mencapai 60,47 persen, meningkat 4,59 persen dibandingkan tahun 2019 akibat dampak pandemi yang memicu pergeseran tenaga kerja dari sektor formal (Putra et al., 2023). Proporsi tertinggi tercatat di Papua (84,43%), Nusa Tenggara Timur (74,51%), dan Sulawesi Barat (73,35%), sedangkan yang terendah berada di Kepulauan Riau (33,67%), DKI Jakarta (36,23%), dan Kalimantan Timur (44,67%) (BPS, 2023b). Perbedaan ini menggambarkan kesenjangan struktur ekonomi antar wilayah di mana daerah dengan industrialisasi rendah dan pendidikan terbatas cenderung lebih bergantung pada pekerjaan informal. Meskipun proporsinya menurun seiring pemulihan ekonomi dan peningkatan permintaan tenaga kerja di sektor formal, sektor informal tetap mendominasi pasar tenaga kerja nasional, menandakan perannya yang besar dalam menopang ekonomi sekaligus menunjukkan tingginya kerentanan pekerjaannya terhadap risiko sosial ekonomi utamanya kemiskinan (Dewantoro, 2024; Hamid, 2022).

Kualitas sumber daya manusia memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi karena menentukan kemampuan masyarakat dalam bekerja produktif, berinovasi, dan meningkatkan kesejahteraan (Nuriyah et al., 2017; Prameswari & Purbadharma, 2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian tersebut berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kesehatan dan umur panjang, tingkat pendidikan, serta standar kehidupan yang layak. (BPS, 2024; Budhijana, 2019). Berdasarkan teori Human Capital yang dikemukakan oleh (Becker, 1993), manusia dipandang sebagai bentuk modal penting bagi pembangunan, yang tercermin dari pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Peningkatan IPM merefleksikan peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan (Lismana & Sumarsono, 2022; Zulgani et al., 2022). Nilai IPM Indonesia periode 2019–2023 meningkat rata-rata 0,61 persen per tahun, namun masih menunjukkan kesenjangan antarprovinsi. DKI Jakarta (83,55%), DI Yogyakarta (81,09%), dan Kepulauan Riau (79,08%) menjadi provinsi dengan IPM tertinggi, sedangkan Papua (63,01%), Papua Barat (67,47%), dan Nusa Tenggara Timur (68,40%) memiliki IPM terendah (BPS, 2023a). Kondisi ini menunjukkan belum meratanya kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Selain kualitas SDM, aspek akses terhadap pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan. Akses pembiayaan yang inklusif memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan (Hidayat & Sari, 2022). Lembaga perbankan memiliki fungsi strategis dalam mendukung kegiatan perekonomian sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat (Budiyanti, 2018; Ilyasa et al., 2025). Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut diwujudkan melalui penyaluran kredit mikro oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yakni lembaga keuangan

formal yang dirancang untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Ismail et al., 2024). Sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, BPR berfungsi mendukung inklusi keuangan terutama di daerah pedesaan dan komunitas terpencil, dengan fokus pada segmen masyarakat kecil dan pelaku UMKM. BPR unggul dalam memberikan layanan yang mudah diakses, bersifat personal, serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang sulit terjangkau oleh bank umum (Malihah et al., 2024). Berdasarkan data OJK (2023), total kredit yang disalurkan BPR mencapai Rp140,791 miliar pada tahun 2023, nominal tersebut meningkat dibandingkan Rp108,784 miliar pada tahun 2019. Meningkatnya penyaluran kredit ini menunjukkan semakin besarnya peran BPR dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Namun efektivitas kredit BPR dalam menurunkan kemiskinan masih diperdebatkan, karena beberapa penelitian menunjukkan kredit dapat meningkatkan pendapatan, sementara penelitian lain menemukan kredit yang tidak diarahkan pada kegiatan produktif kurang efektif dalam memperbaiki kondisi ekonomi.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai hubungan antara pekerja informal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kredit BPR terhadap kemiskinan. Sihotang et al. (2023) dan Suratini et al. (2025) menemukan bahwa peningkatan proporsi pekerja informal berpengaruh positif signifikan yang artinya memperburuk kondisi kemiskinan akibat rendahnya pendapatan serta ketidakstabilan pekerjaan, sementara penelitian oleh Iqraam & Sudibia (2019) dan Meimela (2019) menunjukkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pada variabel IPM, penelitian oleh Tirta & Putri (2025) serta Prameswari & Purbadharmaja (2024) menunjukkan pengaruh negatif signifikan yang berarti peningkatan kualitas SDM mampu menurunkan kemiskinan, namun temuan tersebut berbeda dengan Sipahutar & Nasution (2023) yang menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, Ismail et al. (2024) menemukan bahwa kredit BPR berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan Rizkiyah & Nidar (2022) menunjukkan pengaruh positif signifikan yang artinya kredit BPR justru meningkatkan kemiskinan karena ketidaktepatan penyaluran kredit dan penggunaan dana yang tidak produktif.

Inkonsistensi hasil penelitian tersebut mengindikasikan beberapa hal penting. Pertama, kompleksitas hubungan kausal antara ketiga variabel dengan kemiskinan yang mungkin dipengaruhi oleh konteks geografis, periode penelitian, dan karakteristik sampel yang berbeda. Kedua, masih terbatasnya penelitian yang mengintegrasikan ketiga variabel secara simultan dalam satu kerangka analisis, sehingga pemahaman tentang interaksi dan efek gabungan dari variabel-variabel tersebut masih belum utuh. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan cakupan wilayah yang terbatas atau fokus pada provinsi tertentu, sehingga generalisasi temuan untuk skala nasional menjadi terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, kondisi pasca-pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika ketenagakerjaan dan kemiskinan di Indonesia, sehingga diperlukan pembaruan analisis empiris dengan data terkini (2019-2023) yang mencakup periode pandemi dan pemulihan ekonomi. Kedua, penelitian ini mengisi gap literatur dengan menguji ketiga variabel secara simultan dalam model panel

skala nasional yang mencakup seluruh 34 provinsi Indonesia, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang determinan kemiskinan di berbagai konteks regional. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan empiris yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang terintegrasi, mencakup dimensi ketenagakerjaan, pengembangan SDM, dan inklusi keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi Indonesia selama 2019–2023. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pengaruh pekerja informal terhadap kemiskinan di Indonesia? (2) Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Indonesia? (3) Bagaimana pengaruh kredit BPR terhadap kemiskinan di Indonesia? (4) Bagaimana pengaruh simultan ketiga variabel tersebut terhadap kemiskinan di Indonesia? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi literatur ekonomi pembangunan serta berperan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis ketenagakerjaan, peningkatan kualitas SDM, dan inklusi keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk panel, yang mengombinasikan dimensi waktu (time series) dan antarwilayah (cross-section). Data mencakup 34 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023 dan diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Tingkat Kemiskinan (Y), yang merepresentasikan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan serta meningkatkan taraf hidup layak, dan dinyatakan dalam satuan persentase. Variabel independennya meliputi Pekerja Informal (X1), yaitu proporsi penduduk yang bekerja pada sektor informal meliputi pekerja berusaha sendiri, berusaha dengan bantuan buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas, serta pekerja keluarga atau tidak dibayar terhadap total penduduk bekerja, yang dinyatakan dalam satuan persentase; Indeks Pembangunan Manusia (X2), yaitu indikator komposit yang menilai capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, yang dinyatakan dalam satuan persentase; Kredit BPR (X3) menggambarkan total nominal penyaluran kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat di setiap provinsi, yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi data panel dengan perangkat lunak EViews 12. Model regresi data ditentukan melalui tiga metode pengujian, yaitu CEM (Common Effect Model), FEM (Fixed Effect Model), dan REM (Random Effect Model) guna memilih model regresi terbaik untuk dapat digunakan dalam penelitian ini. Penentuan model regresi terbaik dilakukan dengan melakukan uji Chow untuk mengidentifikasi model yang terbaik diantara CEM dengan FEM, kemudian uji Hausman untuk menentukan model yang terbaik diantara FEM dengan REM, dan uji

Lagrange Multiplier untuk menentukan model yang terbaik diantara CEM dengan REM (Basuki, 2021). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Pada persamaan (1) satuan variabel independen Kredit BPR (X3) adalah rupiah, sedangkan variabel dependen Tingkat Kemiskinan (Y) dinyatakan dalam persentase, maka dilakukan transformasi data dengan Logaritma Natural (LN) pada variabel Kredit BPR (X3) untuk menstandarkan satuan data menjadi persentase. Dengan demikian, persamaan regresi setelah transformasi sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \text{LN} X_{3it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana Y merupakan Tingkat Kemiskinan;  $\alpha$  adalah konstanta; koefisien regresi dari setiap variabel independen berupa  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ ;  $X_1$  adalah Pekerja Informal;  $X_2$  adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM);  $X_3$  adalah Kredit BPR; i merupakan individu ke-i (cross section); t merupakan periode ke-t (time series); dan  $\varepsilon$  merupakan error term; LN merupakan Logaritma Natural.

Setelah menentukan model terbaik, dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang bertujuan untuk menilai apakah model telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik umumnya meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas. Namun, dalam konteks analisis data panel, tidak semua pengujian tersebut relevan untuk dilakukan. Menurut Basuki (2021), uji normalitas dan autokorelasi tidak menjadi syarat wajib dalam model data panel sebab data yang dianalisis tidak termasuk kategori deret waktu atau time series murni, sehingga hasil pengujian tersebut tidak memberikan informasi yang berarti terhadap model. Oleh karena itu, penelitian ini hanya melakukan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan model terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Berikutnya dilakukan uji hipotesis yang mencakup uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) (Basuki, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif**

	Y	X1	X2	LN X3
Mean	10.39529	59.42006	72.54541	6.967290
Maximum	27.53000	84.43000	83.55000	10.45456
Minimum	3.470000	29.57000	60.84000	3.135730
Std. Dev.	5.334426	10.20498	3.888846	1.725026
Observations	170	170	170	170

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1, menunjukkan bahwa total observasi dalam penelitian ini sebanyak 170 pada periode waktu 2019-2023. Variabel Tingkat Kemiskinan (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 10.39 persen dengan nilai

minimum 3.47 persen di Provinsi DKI Jakarta dan nilai maksimum 27.53 persen di Provinsi Papua, serta standar deviasi 5.33. Variabel Pekerja Informal (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 59.42 persen dengan nilai minimum 29.57 persen di Provinsi Kepulauan Riau dan nilai maksimum 84.43 persen di Provinsi Papua, serta standar deviasi 10.2. Variabel IPM (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 72.54 persen dengan nilai minimum 60.84 persen di Provinsi Papua dan nilai maksimum 83.55 persen di Provinsi DKI Jakarta, serta standar deviasi 3.88. Variabel Kredit BPR (LN X3) memiliki rata-rata sebesar 6.96 persen dengan nilai minimum 3.13 persen di Provinsi Sulawesi Barat dan nilai maksimum 10.45 persen di Provinsi Jawa Tengah, serta standar deviasi 1.72.

### Pemilihan Model Regresi Data Panel

**Tabel 2. Regresi Data Panel**

Variabel Dependen (Y): Kemiskinan	Model Data Panel					
	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	t-statistic	prob.	t-statistic	prob.	t-statistic	prob.
C	40.54212	0.0000	20.77361	0.0000	22.12101	0.0000
X1	0.191132	0.0000	0.068530	0.0003	0.088046	0.0000
X2	-0.589356	0.0000	-0.235821	0.0000	-0.271311	0.0000
LN X3	0.179574	0.3075	0.381408	0.0146	0.391109	0.0072
R-squared	0.519688		0.995881		0.237642	
Adj. R-squared	0.511008		0.994767		0.223864	
F-Statistic	59.86960		893.3379		17.24847	
Prob (F-stat)	0.000000		0.000000		0.000000	
Durbin-Watson stat	0.024447		1.798818		1.400181	

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil estimasi awal pada Tabel 2, tahap berikutnya dilakukan pengujian untuk mengidentifikasi model data panel yang paling tepat di antara model Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model regresi dilakukan melalui tiga tahapan uji yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model yang paling menggambarkan karakteristik data dan memberikan hasil estimasi yang valid untuk analisis lebih lanjut

### Uji Chow

**Tabel 3. Uji Chow**

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-Section F	465.993600	(33,133)	0.0000
Cross-Section Chi-square	809.020137	33	0.0000

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil uji Chow pada Tabel 3, nilai probabilitas Cross-Section Chi-Square adalah  $0.0000 < \alpha (0.05)$ , sehingga disimpulkan bahwa model yang tepat adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model (CEM). Uji Hausman

kemudian dapat dilakukan untuk menentukan apakah model terbaik tersebut merupakan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM).

### Uji Hausman

**Tabel 4. Uji Hausman**

Effect Test	Chi-sq. Statistic	Chi-sq. d.f	Prob.
Cross-Section Random	12.837354	3	0.0050

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil uji hausman pada Tabel 4, nilai probabilitas Cross-Section Random adalah  $0.0050 < \alpha (0.05)$ , sehingga disimpulkan bahwa model yang tepat adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Random Effect Model (REM). Uji Lagrange Multiplier tidak dilakukan lebih lanjut karena temuan uji Hausman mengindikasikan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model terbaik untuk mengestimasi seluruh variabel.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam model. Model dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai koefisien korelasi antar variabel independen lebih kecil dari  $\alpha (0,85)$ .

**Tabel 5. Uji Multikolinearitas**

	Y	X1	X2	LN X3
Y	1.000000	0.656974	-0.666878	-0.121439
X1	0.656974	1.000000	-0.696613	-0.137212
X2	-0.666878	-0.696613	1.000000	0.301034
LN X3	-0.121439	-0.137212	0.301034	1.000000

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 5, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel Pekerja Informal (X1) dengan variabel IPM (X2) adalah  $-0.696613 < \alpha (0.85)$ , yang berarti tidak ditemukan indikasi multikolinearitas antara variabel Pekerja Informal dengan IPM. Nilai koefisien korelasi antara variabel Pekerja Informal (X1) dengan variabel Kredit BPR (LN X3) adalah  $-0.137212 < \alpha (0.85)$ , yang berarti tidak ditemukan indikasi multikolinearitas antara variabel Pekerja Informal dengan Kredit BPR. Selain itu, nilai koefisien korelasi antara variabel IPM (X2) dengan variabel Kredit BPR (LN X3) adalah  $0.301034 < \alpha (0.85)$ , yang berarti tidak ditemukan indikasi multikolinearitas antara variabel IPM dengan Kredit BPR. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa data ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

### ***Uji Heteroskedastisitas***

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi adanya perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model. Model dikatakan baik apabila varians residual bersifat konstan atau tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.644949	1.174381	1.400695	0.1636
X1	-0.014829	0.009504	-1.560234	0.1211
X2	-0.006798	0.021497	-0.316233	0.7523
LN X3	-0.000810	0.080362	-0.010083	0.9920

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 6, menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada variabel Pekerja Informal (X1) sebesar  $0.1211 > \alpha (0.05)$ , variabel IPM (X2) sebesar  $0.7523 > \alpha (0.05)$ , dan variabel Kredit BPR (LN X3) sebesar  $0.9920 > \alpha (0.05)$ . Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model maupun data tidak mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap asumsi klasik, sehingga analisis lanjutan dapat dilakukan.

### ***Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM)***

**Tabel 7. Regresi Data Panel Fixed Effect Model (FEM)**

<i>Fixed Effect Model</i>				
Variable	Coefficient	std. Error.	t-Statistic	Prob.
C	20.77361	2.252859	9.220997	0.0000
X1	0.068530	0.018233	3.758644	0.0003
X2	-0.235821	0.041238	-5.718506	0.0000
LN X3	0.381408	0.154162	2.474079	0.0146

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil regresi data panel Fixed Effect Model (FEM) pada Tabel 7, model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = 20.77361 + 0.068530X1 - 0.235821X2 + 0.381408LN X3 \dots\dots(3)$$

Berdasarkan model persamaan (3) di atas, diketahui nilai konstanta sebesar 20.77361 menunjukkan bahwa ketika variabel Pekerja Informal (X1), IPM (X2), dan Kredit BPR (LN X3) sama dengan atau dianggap nol (konstan), maka tingkat kemiskinan berada pada 20.77361 satuan. Koefisien Pekerja Informal (X1) sebesar 0.068530 menunjukkan hubungan positif, artinya setiap peningkatan pekerja informal sebesar 1 persen akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.068530, dengan asumsi IPM (X2) dan Kredit BPR (LN X3) bernilai konstan. Koefisien IPM (X2) sebesar -0.235821 menunjukkan hubungan negatif, di mana kenaikan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.235821, dengan asumsi Pekerja Informal (X1) dan Kredit BPR (LN X3) bernilai konstan. Sementara itu, koefisien Kredit BPR (LN X3) sebesar 0.381408 juga menunjukkan hubungan positif, yang berarti setiap kenaikan

Kredit BPR sebesar 1 persen akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0.381408, dengan asumsi Pekerja Informal (X1) dan IPM (X2) bernilai konstan.

## Uji Hipotesis

### Uji Parsial (t)

Uji parsial (t) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Hasil uji ini menunjukkan sejauh mana setiap variabel independen berkontribusi secara signifikan dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 8. Uji Parsial (t)**

<i>Fixed Effect Model</i>				
Variable	Coefficient	std. Error.	t-Statistic	Prob.
C	20.77361	2.252859	9.220997	0.0000
X1	0.068530	0.018233	3.758644	0.0003
X2	-0.235821	0.041238	-5.718506	0.0000
LN X3	0.381408	0.154162	2.474079	0.0146

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada Tabel 8, menunjukkan bahwa variabel Pekerja Informal (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar  $3.75864 > t\text{-tabel } 1.97436$  dan probabilitas  $0.0003 < \alpha (0.05)$ , dengan koefisien 0.068530. Hal ini menunjukkan bahwa Pekerja Informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sejalan dengan temuan (Sihotang et al., 2023) dan (Suratini et al., 2025).

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar  $-5.71850 > t\text{-tabel } 1.97436$  dan probabilitas  $0.0000 < \alpha (0.05)$ , dengan koefisien -0.235821. Hal ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sejalan dengan temuan (Tirta & Putri, 2025) serta (Prameswari & Purbadharmaja, 2024).

Variabel Kredit BPR (LN X3) memiliki t-hitung sebesar  $2.47407 > t\text{-tabel } 1.97436$  dan probabilitas  $0.0146 < \alpha (0.05)$ , dengan koefisien 0.381408. Hal ini menunjukkan bahwa Kredit BPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan, sejalan dengan temuan (Rizkiyah & Nidar, 2022).

### Uji Simultan (F)

Uji simultan (F) dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model.

**Tabel 9. Uji Simultan (F)**

R-squared	0.995881	Mean dependent var	10.39529
Adj. R-squared	0.994767	S.D. dependent var	5.334426
S.E. of Regression	0.385901	Akaike info criterion	1.123372
Sum squared resid	19.80629	Schwarz criterion	1.805869
Log likelihood	-58.48663	Hannan-Quinn criter.	1.400322
F-Statistic	893.3379	Durbin-Watson stat	1.798818
Prob (F-stat)	0.000000		

Sumber: Data diolah dengan EViews 12 (2025).

Berdasarkan hasil uji simultan (F) pada Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai F-tabel ( $df_1 = 3$ ;  $df_2 = 166$ ) diperoleh sebesar 2.66, dengan demikian nilai F hitung  $>$  F tabel ( $893.3379 > 2.66$ ) dan probabilitas (F-Stat) sebesar  $0.000000 < \alpha$  (0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pekerja Informal, IPM, dan Kredit BPR ketiganya secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan.

### ***Koefisien Determinasi ( $R^2$ )***

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, yang ditunjukkan oleh nilai Adj. R-squared. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada Tabel 9, menunjukkan bahwa nilai Adj. R-squared sebesar 0.994767 atau 99.47%. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel dependen Kemiskinan akan dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pekerja Informal, IPM, dan Kredit BPR sebesar 99.47% sedangkan sisanya senilai 0.53% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini.

### **Pembahasan**

#### ***Pengaruh Pekerja Informal terhadap Kemiskinan***

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pekerja informal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Sihotang & Ratih (2023) dan Suratini et al. (2025) yang menemukan bahwa pekerja informal berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan karena mayoritas pekerja di sektor ini menerima upah di bawah standar, jam kerja yang tidak tetap, serta minimnya perlindungan sosial, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan. Pekerja informal umumnya memiliki karakteristik keterampilan yang terbatas, pendapatan tidak tetap, jam kerja tidak teratur, serta akses yang minim terhadap jaminan sosial dan fasilitas ketenagakerjaan (ILO, 2018).

Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang memperkuat kerentanan terhadap kemiskinan. Temuan ini selaras dengan pandangan Sharp (1996), yang menyatakan bahwa ketimpangan kepemilikan sumber daya serta rendahnya kualitas sumber daya manusia berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan pendapatan, sehingga mempertahankan individu dalam kondisi kemiskinan (Sinaga, 2022). Dalam konteks ini, pendapatan yang tidak stabil dan keterbatasan modal membuat pekerja informal sulit berinvestasi pada pendidikan atau peningkatan keterampilan, sehingga peluang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi menjadi semakin kecil. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang berulang karena keterbatasan produktivitas membatasi peluang mereka untuk berpindah ke sektor formal yang lebih menguntungkan (Taufiq & Dartanto, 2020). Fenomena ini tercermin dalam

struktur ketenagakerjaan Indonesia, di mana lebih dari separuh angkatan kerja masih berada di sektor informal, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (BPS, 2023b).

Dominasi sektor ini menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja formal, pendidikan berkualitas, dan perlindungan ketenagakerjaan (Brown & Roevers, 2016; Nariswari, 2020; Setyanti, 2020). Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya strategi peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja informal melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan guna mendorong transisi tenaga kerja menuju sektor formal yang lebih produktif dan berdaya saing.

### ***Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan***

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan teori Human Capital oleh Becker (1993), yang menekankan bahwa investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta memperluas peluang ekonomi (Ramadanisa & Triwahyuningtyas, 2022).

Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan layak, serta membuka peluang untuk bekerja di sektor formal dan mengembangkan keterampilan usaha (Dartanto et al., 2019; Somani, 2021). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Prameswari & Purbadharmaja (2024) serta Tirta & Putri (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara signifikan menekan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan daya saing tenaga kerja. Secara empiris, provinsi dengan IPM tinggi seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan cenderung memiliki tingkat kemiskinan rendah, sedangkan provinsi dengan IPM rendah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih menghadapi kemiskinan yang tinggi (BPS, 2023a).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas sumber daya manusia turut berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan antarwilayah. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata, pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih inklusif dan berkeadilan sehingga mendorong percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia.

### ***Pengaruh Kredit BPR terhadap Kemiskinan***

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa penyaluran kredit BPR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti peningkatan penyaluran kredit BPR

justru diikuti kenaikan tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perluasan akses pembiayaan tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan, terutama jika penyalurannya belum tepat sasaran. Penelitian Rizkiyah & Nidar (2022) juga menemukan hal serupa, bahwa kredit BPR belum sepenuhnya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan sebagai modal usaha produktif sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan menjadi tidak optimal.

Dalam pandangan Sharp (1996), situasi ini mencerminkan ketimpangan akses modal, di mana akses kredit yang semestinya memberikan peluang peningkatan modal usaha justru tidak banyak dinikmati oleh kelompok miskin. Penggunaannya yang kurang produktif juga membuat pendapatan tetap rendah sehingga masyarakat berpenghasilan rendah sulit keluar dari kondisi kerentanan ekonomi. Sejalan dengan temuan tersebut, studi internasional menunjukkan bahwa kredit mikro dapat memperburuk kondisi rumah tangga miskin apabila tidak dikelola dengan baik, terutama karena struktur bunga, lemahnya pengawasan, dan kecenderungan lembaga keuangan dalam memprioritaskan debitur dengan risiko lebih rendah, sehingga kelompok miskin sering kali tidak menjadi penerima utama manfaat kredit (Thai-ha, 2021). Manfaat kredit mikro justru lebih banyak dirasakan oleh kelompok menengah yang memiliki usaha stabil dan jaminan aset yang lebih kuat (Arif et al., 2019). Dengan demikian, efektivitas kredit BPR sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam menilai kelayakan debitur, menyesuaikan skema pinjaman dengan kebutuhan usaha, serta pengawasan penggunaan dana (Ismail et al., 2024).

Hasil penelitian ini menekankan perlunya perbaikan mekanisme penyaluran kredit oleh pemerintah dan lembaga keuangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima, pendampingan usaha, serta pengembangan produk pembiayaan yang mendorong kegiatan produktif. Selain itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi aspek penting karena pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan dan pemanfaatan kredit dapat membantu debitur memanfaatkan pinjaman secara lebih bijak dan produktif (Suidarma et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data panel pada 34 provinsi di Indonesia periode 2019–2023, penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja informal dan kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi pekerja di sektor informal yang umumnya memiliki pendapatan rendah, jam kerja tidak stabil, dan minim perlindungan sosial berkontribusi pada peningkatan kemiskinan. Di sisi lain, penyaluran kredit yang belum tepat sasaran dan digunakan untuk keperluan yang tidak produktif juga berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan. Sebaliknya, peningkatan kualitas pembangunan manusia berperan dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan produktivitas

dan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan dan pemberdayaan pekerja informal, serta perbaikan mekanisme penyaluran kredit agar lebih tepat sasaran dan produktif. Selain itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi aspek penting agar kredit yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara bijak dan produktif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat berlangsung lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial.

## REFERENSI

- Arif, M., Ismail, M., & Santoso, D. B. (2019). Does microfinance affect poverty reduction and inequality in Indonesia? *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(4), 122–125.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Indeks pembangunan manusia (IPM) menurut provinsi, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrUIJZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Persentase kemiskinan menurut provinsi, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWetISZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi--2024.html?year=2023>
- Badan Pusat Statistik. (2023c). *Profil kemiskinan di Indonesia, Maret 2023* (Berita Resmi Statistik No. 47). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023d). *Proporsi tenaga kerja informal menurut provinsi, 2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1MyMy/proporsi-lapangan-kerja-informal-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/22/ffb3e2d42b94d727d97e78d88/boklet-survei-angkatan-kerja-nasional-agustus-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks pembangunan manusia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/13/8f77e73a66a6f484c655985a/indeks-pembangunan-manusia-2023.html>
- Brown, A., & Roeber, S. (2016). *Enhancing productivity in the urban informal economy*. UN-Habitat. <https://unhabitat.org/enhancing-productivity-in-the-urban-informal-economy>
- Budhijana, R. B. (2019). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2000–2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan*, 5(1), 36–44. <https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>

- Budiyantri, E. (2018). Peran kredit modal kerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam perekonomian di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal DPR RI*, 23(2), 143–154. <https://doi.org/10.22212/kajian.v23i2.1879>
- Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. (2019). Intragenerational economic mobility in Indonesia: A transition from poverty to middle class during 1993–2014. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 1–57. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1657795>
- Dewantoro, F. R. (2024). Analisis risiko kerentanan pekerja informal di Indonesia tahun 2022. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 9–17. <https://doi.org/10.31294/eco.v8i1.21205>
- Hamid, A. (2022). The urgency of labor law for informal sector workers in the welfare state concept: An evidence in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(6), 528–541. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i6.2036>
- Hidayat, P., & Sari, R. L. (2022). Linkage between financial inclusion and Indonesian welfare: A recent evidence. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2108299>
- International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture*. <https://www.ilo.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-picture-third-edition>
- Ilyasa, W. N., Kurniawan, M. L. A., Lubis, F. R. A., & Salim, A. (2025). The role of credit for poverty alleviation in Indonesia: Evidence from panel data analysis. *Integrated Journal of Business and Economics*, 9(2), 203–217. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v9i2.1101>
- Ismail, M., Santoso, D. B., & Satria, D. (2024). Microfinance and poverty in Indonesia: The macro impact of People's Credit Bank. *Journal of Business Economics & Management*, 25(4), 647–664. <https://doi.org/10.3846/jbem.2024.22001>
- Istiyani, N., Latifah, K., & Yuliati, L. (2024). Analisis determinan tingkat kemiskinan di Pulau Madura tahun 2015–2023. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 14(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.7216>
- Khamis, M., Newhouse, D., & Weber, M. (2021). *The early labor market impacts of COVID-19 in developing countries* (World Bank Report No. 58). <https://hdl.handle.net/10986/35044>
- Lismana, A. I., & Sumarsono, H. (2022). Analysis of the effect of population growth, human development index, and unemployment rate on poverty in West Java Province 2017–2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 88–97. <https://doi.org/10.22219/jep.v20i01.20286>
- Malihah, S., Sundhusiah, A., Ramadani, A., & Astuti, R. P. (2024). Analisis Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 313–319. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.767>
- Nariswari, R. (2020). Analisis peranan sektor informal terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 9(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6986>
- Nuriyah, S. R., Muafiqie, H., & Junaedi. (2017). Analisis pengaruh produk domestik regional bruto dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Public Power*, 1(2), 97–109.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Data penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 2023*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan->

- [indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2024.aspx](https://indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2024.aspx)
- Prameswari, K. P. S., & Purbadharmaja, I. B. P. (2024). Pengaruh kontribusi sektor pertanian, IPM, dan investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 101–114. <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i2.15519>
- Putra, R. A. A., Ovsianikov, K., & Kotani, K. (2023). COVID-19-associated income loss and job loss: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, 87, 101631. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2023.101631>
- Ramadanisa, N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. *Sibatik Journal*, 1(7), 1049–1062. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.121>
- Riyandini, S. (2024). Analisis pengaruh IPM, upah minimum, TPT, dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2017–2022. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1270–1285. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.23>
- Rizkiyah, T. F., & Nidar, S. R. (2022). Apakah peningkatan kredit Bank Perkreditan Rakyat dan peran UMKM dapat menurunkan tingkat kemiskinan? *Journal IMAGE*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.17509/image.v11i1.35000>
- Sabaha, A., Hanum, K. F., Mumtaz, A., Amilia, L., Rajan, G., Fadhilah, M. F., Futri, A., Habibah, L., & Desmawan, D. (2025). Ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah: Studi kasus Kota Tangerang dan Kabupaten Pandeglang. *Bursa: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 37–42.
- Setyanti, A. (2020). Informality and the education factor in Indonesian labor. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 8(2), 71–80. <https://doi.org/10.21776/ub.JIAE.2020.008.02.7>
- Sihotang, A., Marselina, & Ratih, A. (2023). Labor conditions, wages and non-cash transfers in poverty in Eastern Indonesia. *JSRET: Journal of Scientific, Research, Education, and Technology*, 2(3), 1417–1437. <https://doi.org/10.58526/jsret.v2i3.242>
- Sinaga, A. A. P. (2022). Poverty perspectives and reduction strategies in Indonesia. *Three Seas Economic Journal*, 3(3), 1–9. <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-3-1>
- Somani, R. (2021). The returns to higher education and public employment. *World Development*, 144, 105471. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105471>
- Suidarma, I. M., Widiyanti, K. S., Sukarnasih, D. M., Armanid, A., Marsudiana, I. D. N., & Masno. (2024). Financial literacy can overcome barriers to MSME financing: Evidence from Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(2), 160–183. <https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.2050>
- Suratini, Parera, J. M., Nur, I. S. M., & Gobay, M. Y. (2025). The role of microloans, informal employment, and income in reducing poverty in Eastern Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(3), 1901–1912. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i3.3313>
- Taufiq, N., & Dartanto, T. (2020). Education, informal turnover and poverty dynamics in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 157–172.
- Thai-Ha, L. (2021). *Microfinance and social development: A selective literature review*. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/documents/asian-development-outlook-2021-background-papers>
- Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). Pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat

- kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(2), 1500–1511.  
<https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i2>
- World Bank. (2023). *Pathways towards economic security: Indonesia poverty assessment 2023*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-poverty-assessment>
- Zulgani, Zevaya, F., Mulana, L. Y., & Asfahani, F. R. (2022). Simultaneous modeling analysis of poverty panel data in Jambi Province from 2011 to 2019. *RES MILITARIS*, 12(4), 1007–1020.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

